

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan nasional bertujuan untuk melindungi kedaulatan sebuah negara. Dalam hal ini negara merupakan bagian terpenting dalam keamanan nasional. Keamanan suatu negara yang meliputi keamanan human sources, keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan social, keamanan sumber daya alam dan semua elemen lainnya juga merupakan tugas dari negara itu sendiri untuk menjaga kestabilitasnya, yang artinya bahwa negara menjadi aktor yang berperan penting disini. Dilain sisi, *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994 merupakan badan bentukan PBB yang pertama memperkenalkan konsep human security yang tentunya berbeda dengan national security (Ramadhan, 2011). Dalam politik internasional, kapabilitas keamanan yang ditingkatkan secara tidak sengaja mengancam keamanan negara lain (Jevis, 1978). Peningkatan keamanan yang dianggap mengancam ini bisa kita lihat di wilayah asia timur. Jepang sebagai negara pemimpin di asia timur dalam Buku Putih Pertahanan Jepang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan dan peningkatan kekuatan militer di Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Utara yang disebut-sebut sebagai ancaman.

Dilihat dari sejarah, Jepang merupakan salah satu negara adi daya dimana pada zaman dahulu Jepang berkuasa dan menjajah beberapa negara termasuk kawasan Asia Timur. Jepang bahkan disebut-sebut sebagai negara penjajah yang mengerikan, dan bahkan menimbulkan trauma yang dalam salah satunya negara China. Sejak lama Jepang dan Korea Utara memiliki hubungan yang kurang harmonis karena latar

belakang sejarah di masa lalu. Sebelumnya, Jepang pernah memiliki hak kuasa atas administratif urusan dalam negeri dan luar negeri semenanjung Korea. Namun, hal itu telah berubah semenjak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II kepada Amerika Serikat pada 15 Agustus 1945. Kemudian Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat pada September 1951 sebagai awalan terbentuknya aliansi dalam urusan militer yang menjadikan Jepang menyerahkan urusan keamanan nasionalnya kepada Amerika Serikat dalam rangka mempertahankan keamanan wilayahnya dari serangan luar. Bahkan dalam perjanjian Fransisco atas kekalahan Jepang pasca Perang Dunia ke-dua membatasi kegiatan kemiliteran Jepang, maka dalam urusan pertahanan negaranya sebagian besar di ambil alih oleh pasukan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Jepang. Hal ini dilakukan dibawah konstitusi Jepang pasca perang yang dirancang oleh Amerika Serikat sendiri dan resmi di ratifikasi pada tahun 1947 pada artikel 9 yang berisi pelarangan pengembangan kekuatan militer atas Jepang (Juwana, 1993). Jepang sebagai aktor yang masih terikat dengan konstitusi pasal 9 yang berbunyi:

- (1) *Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling disputes.*
- (2) *In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the State will not be recognized.*

Dapat kita lihat bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Jepang tidak boleh mengembangkan sektor militernya dan juga Jepang menyatakan diri sebagai negara yang anti perang atau pasif. Oleh karena itu, Jepang harus berfikir lebih dalam rangka meningkatkan pertahanan

negaranya selama tidak melanggar konstitusi. Tentu saja hal ini menjadi *struggle* untuk Jepang sendiri mengingat saat ini negara-negara di wilayah Asia Timur sedang gencar-gencarnya mengembangkan kekuatan militer. Oleh karena itu, meskipun Jepang ada di dalam payung keamanan Amerika Serikat, tetapi ancaman dari negara lain masih terbuka salah satunya datang dari Korea Utara yang sedang gencar mengembangkan senjata nuklir (Beer, 1982).

Jepang yang secara geografis berdekatan dengan Korea Utara cukup was-was dengan pembangunan kapabilitas militer berupa uji coba nuklir yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah merasakan bagaimana kengerian bom atom jika diluncurkan. Oleh karena itu, Jepang tentu saja merasa bahwa pembangunan militer seperti misil balistik dan nuklir dikawasan adalah sebuah ancaman yang serius. Korea Utara sekarang menjadi sorotan oleh dunia internasional atas pengembangan senjata nuklir. Korea Utara sering melakukan aktivitas uji coba rudal ke laut lepas yang secara langsung melewati wilayah konstitusi Jepang secara geografis. Uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara melintasi Jepang ini disebut sebagai langkah pertama operasi militernya dan merupakan sinyal bahwa mereka akan meluncurkannya lebih banyak lagi. Peluncuran yang dilakukan direspon oleh Shinzo Abe sebagai suatu ancaman yang serius yang belum pernah terjadi sebelumnya (BBC, 2017).

Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sudah dilakukan sejak lama, bahkan sudah tercatat semenjak tahun 1976. Untuk pertama kalinya pada tahun 1976-1981, Korea Utara melakukan pengembangan rudal menggunakan Scub-B dari uni Soviet dan sebuah landasan peluncuran dari Mesir. Kemudian, pada tahun 1998, Korea Utara menciptakan rudal Rodong yang berdaya jangkau 1.300 km bernama taepodong-1 yang disebut-sebut sebagai peluncuran satelit. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 Korea Utara mengumumkan telah memiliki senjata nuklir, yang kemudian disusul pada tahun 2006 melakukan peluncuran rudal taepong-

2 yang dapat mencapai 15.000 km yang ditunjukkan untuk menyerang Amerika Serikat. Tetapi, rudal yang diciptakan tersebut hanya berupa peluncuran satelit dan menurut para pakar rudal tersebut sulit untuk diubah menjadi roket yang membawa senjata. Berlanjut pada pertengahan tahun 2016, Korea utara menembakkan rudal sejauh 1.000 km yang memasuki wilayah Jepang yang tentu saja hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena pada saat itu Korea Utara juga sekaligus melakukan uji coba nuklir yang kelima. Tidak berhenti disitu, Korea utara melakukan peluncuran rudal balistik jarak menengah yang kemudian memancing teguran dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden AS Donald Trump atas peluncuran rudal yang bernama Pukgukdong-2 ke arah laut terdekat pada februari 2017 (Mutuara, 2017).

Korea Utara secara terus menerus melakukan uji coba rudal balistik yang memasuki zona eksklusif ekonomi Jepang. Sejatinya, Jepang merasa terganggu dengan aktivitas peluncuran rudal ini. Korea Utara menyatakan bahwa uji coba peluncuran roketnya adalah sebagai tujuan ilmiah, uji coba tersebut melewati bagian Jepang yakni pulau Okinawa pada Februari 2016 lalu yang membuat Perdana Menteri Shinzo Abe tidak terima dengan uji coba itu karena menurutnya hal tersebut juga melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa Korea Utara dilarang untuk melakukan uji coba senjata nuklir ataupun rudal balistik (BBC, 2016). Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat telah berkoordinasi untuk menanggapi percobaan senjata nuklir Korea Utara pada 2016, gempa di sekitar Kumamoto Jepang pada bulan April 2016, dan peristiwa lainnya yang mempengaruhi keamanan regional Asia Timur (Congressional Research Service, 2017).

Seperti yang kita tau bahwa Rudal atau peluru kendali adalah senjata yang digunakan oleh para anggota serdadu militer negara baik angkatan darat atau angkatan udara yang bertujuan untuk melumpuhkan musuh. Rudal masuk kedalam

alat atau senjata yang diluncurkan dari darat melalui udara, oleh karena itu untuk menghadapi adanya rudal harus dihadapi dengan sistem pertahanan udara berupa rudal lagi atau *anti-air craft*. Dalam sistem pertahanan udara (*Air Defense*) sistem rudal merupakan unsur yang sangat penting untuk dimiliki. Sistem pertahanan udara (*Air Defense*) adalah suatu tatanana dalam kerangka pertahanan keamanan negara dengan melibatkan seluruh pertahanan udara yang diwujudkan dalam sebuah upaya dan tindakan terpadu secara terus menerus baik secara operasional maupun pembinaan untuk menanggulangi setiap ancaman yang datang dari udara (Priyono, 2011). Namun disini, Jepang yang di cap sebagai negara pencinta damai tidak diperkenankan melakukan perlawanan dengan mengembangkan sistem pertahanan udara yang menunjang seperti pembuatan peluru kendali atau perlawanan melalui pasukan serdadu militernya. Dengan adanya hal tersebut, Jepang berada pada situasi yang dilematik, oleh karena itu Jepang harus berfikir dua kali untuk menghadapi ancaman dari rudal Korea Utara yang dapat membahayakan seluruh masyarakat di wilayah konstitusi Jepang.

Desakan yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB tidak lantas membuat Korea Utara gentar, justru uji coba masih terus berlanjut. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Jepang merasa khawatir bahkan trauma atas rudal yang bisa kapan saja lewat. Peluncuran rudal yang dilakukan menimbulkan adanya suara dentuman yang cukup keras dan getaran seperti gempa, hal ini menjadikan warga Jepang khususnya Hokaido merasa trauma. Kekhawatiran masyarakat tentu saja mendorong Pemerintah Jepang untuk lebih waspada dan harus berusaha untuk menangani trauma warganya dan memikirkan dampak yang lebih serius dari ancaman rudal Korea Utara kedepannya. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Jepang dan Departemen Pertahanan Jepang bisa menanggulangi masalah ini (Tempo, 2018).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Jepang dalam menghadapi ancaman peluncuran uji coba rudal oleh Korea Utara?

C. Kerangka Teori

Guna memahami lebih dalam mengenai bagaimana strategi Jepang dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara yang secara terus menerus meluncurkan rudal balistik melintasi Jepang, maka dibutuhkan kerangka berfikir *Strategy* dan *Early Warning Defense System*.

1. Konsep *Strategy*

Strategy atau istilah lainnya yang lebih populer *grand strategy* merupakan konsep yang ada dalam hubungan internasional. Dalam bukunya, Colin Dueck menyebutkan bahwa *grand strategy* melibatkan kesadaran negara dalam memprioritaskan tujuan atau kepentingan akhir dari kebijakan luar negeri, identifikasi sumber daya potensial yang dimiliki, serta pemilihan rencana dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya tersebut (Dueck C. , 2004).

Strategi suatu negara tidak selamanya akan bersifat statis, justru akan bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perubahan-perubahan factor domestic yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dalam konsep *strategic adjustment* yang dikemukakan oleh Dueck menjelaskan lebih dalam mengenai perubahan intensitas atau strategi sebuah negara, bahkan perubahan yang dialami dapat terjadi secara signifikan. Perubahan dapat terjadi karena adanya pergeseran asumsi atas berbagai factor seperti anggaran belanja militer atau pertahanan, bantuan luar negeri yang didapat, perilaku dari sebuah aliansi, penyebaran pasukan, hingga aktivitas

diplomasi serta pola tindakan sebuah negara terhadap negara lawan (Layne, 1997).

Christopher Layne juga menyebutkan bahwa setiap negara memiliki strategi yang berbeda, namun setiap strateginya melalui proses utama yaitu:

1. Penentuan kepentingan keamanan paling vital bagi negara
2. Identifikasi ancaman-ancaman terhadap kepentingan tersebut
3. Penentuan cara terbaik untuk mengarahkan sumber daya secara politik, militer, ekonomi, dan lainnya yang dapat melindungi kepentingan yang dituju.

Konsep *Strategy* ini sering kali digunakan oleh negara untuk mencapai suatu tujuan negara dalam rangka menghadapi ancaman seperti hal melindungi masyarakat sipil. Ancaman-ancaman yang diterima oleh masyarakat biasanya dititikberatkan kepada negara yang berperan sebagai aktor utama yang harus melindungi masyarakatnya. Ancaman yang datang dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Hal ini berkesinambungan dengan apa yang dialami oleh warga Jepang, dimana saat ini Jepang sedang menghadapi ancaman berupa penembakan rudal balistik oleh Korea Utara menuju laut lepas yang secara geografis melewati kawasan konstitusi Jepang. Dalam rangka menghadapi ancaman tersebut, maka Jepang harus berhati-hati dan teliti dalam memilih strategi yang tepat untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman tersebut.

2. Konsep *Early Warning Defense System*

Dalam dunia militer, sistem pertahanan merupakan hal penting yang harus dimiliki. Postur pertahanan suatu negara bisa meliputi wujud dari kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata oleh sistem pertahanan negara itu sendiri. Sistem pertahanan negara juga dibentuk atas dasar pertahanan diri dari ancaman internal dan

juga yang lebih diperhitungkan adalah dari eksternal. Salah satu ancaman atau serangan dari luar yang butuh perhatian khusus adalah bahayanya senjata nuklir yang kapan saja bisa diluncurkan.

Sistem pertahanan yang dimaksud adalah *Early Warning System*. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuan China Ming Hui Zhang dan Yao Yu Zhang, mereka menyebutkan bahwa *Early warning system* adalah sebuah perangkat peringatan inframerah, yakni sebagai bagian dari sistem peringatan dini darat atau kapal, sistem ini memiliki kemampuan untuk menargetkan dan memberikan instruksi. Untuk mendukung mengamati situasi yang ada di udara, melansir pesawat musuh, rudal, dan sasaran jarak jauh lainnya, yang kemudian memberikan informasi dengan peringatan ke sistem komando. Menurut analisis, Zhang kemudian menjelaskan bahwa keakuratan seluruh sistem dapat mencapai kecepatan 20 detik (Zhang & Zhang, 2012). *Early Warning System* merupakan salah satu jenis pertahanan yang dikhususkan untuk mengumpulkan data, lalu mengirimkan data tersebut kepada khalayak umum berupa peringatan. Sistem pertahanan ini dapat masuk kedalam kategori sistem pertahanan udara atau *Air Defense*. Terdapat dua sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan mengirimkan informasi mengenai ancaman atau serangan dari luar yakni *The Ballistic Missile Early Warning System* (BMEWS) dan *Missile Defense Alarm System* (MIDAS) (Cabinet Secretariat, 2012).

Pada tahun 1959, *The Ballistic Missile Early Warning System* (BMEWS) menjadi radar pendeteksi rudal pertama yang diciptakan. Sistem BMEWS ini menyediakan jarak jauh, peringatan langsung dari serangan rudal atas wilayah kutub bagian bumi utara. Di Trinidad, British BMEWS menyediakan pengawasan dan pelacakan rudal balistik, sebagai langkah menyeluruh pengembangan sistem. Situs Trinidad Radar mulai beroperasi pada Februari 1959 yakni mengumpulkan data tentang rudal yang ditembakkan ke Rudal Atlantik, satelit dan

meteor (Pike, *Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS)* , 2018). Sedangkan *Missile Defense Alarm System* atau bisa disingkat sebagai MIDAS merupakan sebuah program pengembangan untuk mendapatkan sistem satelit yang mengorbit untuk mendeteksi inframerah ICBM (*International Continental Ballistic Missile*) milik musuh dalam fase peluncurannya. MIDAS ini kemudian memberikan peringatan dini mengenai kemungkinan adanya peluncuran atau serangan dari musuh. Peringatan akan diberikan sekitar 15-25 detik dan dengan tambahan dari *The Ballistic Missile Early Warning System* maka durasinya bisa bertambah menjadi 20-33 detik pada kasus serangan yang paling mungkin terjadi (seluruh daerah kutub utara). Dalam proses pengerjaannya setiap satu satelit bekerja untuk satu stasiun pembacaan. Deteksi dan transmisi ke stasiun pembacaan dilakukan secara langsung sehingga tidak memerlukan adanya penyimpanan di satelit terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan adanya kecepatan dan ketepatan dalam pendeteksian dan pentransmisian data ke stasiun monitor pembaca (Group, 1961).

Dalam hal tersebut, meskipun Jepang saat ini masih berada dalam payung pertahanan Amerika Serikat dalam urusan militernya, Jepang belum sepenuhnya merasa aman, oleh karena itu Jepang berusaha berfikir dua kali untuk memperkuat pertahanan negaranya dalam rangka menghadai ancaman rudal Korea Utara. Menimbang situasi dari sudut pandang ini pemerintah nasional Jepang secara inheren berkewajiban untuk memastikan perdamaian dan menjaga keselamatan masyarakatnya dari serangan luar (*Armed Attack Situation Response Law*). Pada juni 2004, Undang-undang tentang tindakan untuk Perlindungan Rakyat dalam situasi penyerangan bersenjata, dll (*Civil Protection Law*) diberlakukan untuk membuat seluruh bangsa sepenuhnya siap menghadapi situasi ini dengan melakukan tindakan yang tepat dan segera melindungi diri dari ancaman. Selanjutnya, Jepang memanfaatkan adanya teknologi pendeteksi radar ini yakni

MIDAS dan BMEWS untuk dijadikan sebagai pertahanan berupa sistem peringatan dini tentang peluncuran rudal balistik milik Korea Utara yang melewati Jepang. Kemudian, muncullah terobosan teknologi yang menunjang pertahanan udara yang bernama J-Alert yang dicanangkan oleh *Secretariat Cabinet Civil Protection Portal Site* milik Jepang. Sistem J-Alert ini dibentuk untuk memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat Jepang yang di wilayahnya telah terpasang alarm ini untuk mendengarkan atau mengikuti instruksi yang diberikan oleh alat ini.

Dalam kaitannya dengan teori *Strategy*, Pemerintah Jepang menjadi aktor yang berperan sebagai penentu kebijakan mengenai bagaimana cara untuk mencapai tujuannya. Disini pemerintah Jepang akhirnya membuat sebuah strategi dengan menilik fungsi dari adanya *Early Warning defense System* sebagai alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan mengenai info yang harus diketahui oleh masyarakatnya, khususnya mengenai ancaman. Alasan mengapa Jepang menggunakan dan mengembangkan teknologi ini adalah karena J-Alert ini dianggap sebagai alat yang efektif dalam menunjang sistem pertahanan Jepang dan secara tidak langsung ini juga tidak melanggar konstitusi yang mengikat Jepang.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teori yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara dari pokok penelitian ini yaitu: Strategi Pemerintah Jepang dalam menghadapi ancaman uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara adalah dengan menggunakan sistem J-Alert yang memiliki fungsi sebagai implementasi dari teori *Early Warning Defense System*. J-Alert merupakan terobosan baru berupa alat pendeteksi dan peringatan dini mengenai ancaman seperti peluncuran rudal yang kapan saja dapat mendekat dan melewati wilayah konstitusi Jepang.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam rangka menghadapi ancaman melindungi masyarakatnya dari Korea Utara atas peluncuran rudal yang melewati kawasan teritorial Jepang menuju laut lepas tanpa melanggar konstitusi yang mengikat Jepang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dalam mengumpulkan dan mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta yang telah ada yang kemudian didukung oleh fakta-fakta sebelumnya, yang kemudian ditariklah sebuah kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Dimana data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang meliputi buku, jurnal, laporan, surat kabar, situs-situs internet, berita *online*, dokumen perjanjian internasional serta sumber-sumber lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana usaha Pemerintah Jepang menghadapi ancaman dari peluncuran rudal Korea Utara untuk melindungi masyarakatnya. Dimulai dari uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara menjadi sorotan bagi dunia internasional dan menjadi ancaman kawasan khususnya Jepang.

Selanjutnya dibuktikan dengan teori *Strategy* dan *Early warning Defense System* bahwa Jepang menggunakan strategi pertahanan berupa J-Alert untuk merespon adanya uji coba nuklir oleh Korea Utara yang melewati wilayah teritori Jepang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab yang meliputi:

- BAB I: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan dengan gambaran dan data yang diuraikan secara umum.
- BAB II: menjelaskan mengenai lanjutan dari latar belakang masalah. Uraian tentang dinamika keamanan Jepang pasca Perang Dunia II.
- BAB III: memaparkan mengenai ancaman yang dihadapi oleh Jepang di Asia Timur khususnya peluncuran rudal Korea Utara.
- BAB IV membahas tentang kebijakan penggunaan J-Alert sampai dengan tahun 2014 sebagai alat pendeteksi dan peringatan diri untuk evakuasi.
- BAB V: mengandung ulasan mengenai penjelasan yang berisi inti dari ulasan dalam bab-bab sebelumnya berupa kesimpulan.